

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan pada penelitian ini maka, dapat ditarik beberapa kesimpulan, di antaranya :

1. Kemunculan pekerja anak di Indonesia dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi keluarga. Pekerja anak mayoritas sudah tinggal di rumah dengan lantai, dinding dan jamban layak. Namun, sebagian besar pekerja anak masih tinggal di rumah dengan sumber air minum tidak layak. Selain itu, pekerja didominasi oleh anak dengan Kepala Rumah Tangga (KRT) yang bekerja di sektor pertanian dan memiliki pendidikan yang rendah. Kondisi ini mencerminkan bahwa keterbatasan ekonomi yang dialami oleh anak akan mendorong mereka untuk berpartisipasi dini dalam pekerjaan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
2. Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai besar sudah memiliki rumah dengan lantai, dinding, jamban dan sumber air minum yang layak. Kepala Rumah Tangga (KRT) yang berprofesi sebagai pada sektor pertanian cenderung menjadi penerima PKH. Selain itu, Kepala Rumah Tangga (KRT) dengan pendidikan rendah juga memiliki kecenderungan yang tinggi untuk menjadi penerima PKH.
3. Indikator perumahan seperti Kepala Rumah Tangga (KRT) yang bekerja di sektor pertanian dengan pendidikan rendah secara signifikan berpeluang untuk mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH). Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga miskin yang menerima PKH tidak hanya didasarkan pada kemiskinan secara moneter, namun juga mencakup kemiskinan multidimensi.
4. Program Keluarga Harapan (PKH) berdampak signifikan dalam mencegah anak untuk bekerja. Namun dampak PKH masih tergolong kecil yaitu hanya 0,84 persen. Dampak PKH yang masih minim terhadap pekerja anak disebabkan oleh cakupan PKH yang terbatas sehingga tidak mampu

menyeimbangi peningkatan jumlah pekerja anak akibat guncangan ekonomi semasa pandemi Covid-19 dan masih tinggi ketergantungan rumah tangga terhadap pekerja anak meskipun pandemi telah berlalu.

## 5.2 Saran

Berdasarkan temuan pada penelitian ini, PKH berdampak signifikan namun masih terbatas dan tergolong kecil dalam mencegah anak untuk bekerja di Indonesia. Berikut disajikan saran sebagai rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan untuk mengurangi pekerja anak melalui efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH):

1. Penguatan Regulasi dan Mekanisme Penegakan Aturan PKH, pemerintah perlu menerapkan mekanisme yang lebih ketat dengan mewajibkan setiap keluarga penerima menandatangani pernyataan kesanggupan mempertahankan anaknya di pendidikan formal tanpa bekerja. Pemantauan terhadap komitmen rumah tangga harus ditingkatkan melalui kolaborasi antara pendamping PKH dan pemerintah. Sanksi tegas harus diberlakukan jika terjadi pelanggaran komitmen pada rumah tangga. Sanksi dapat dilakukan secara bertahap, mulai dari peringatan resmi, pengurangan besaran bantuan, hingga penghentian permanen bagi pelanggar berat.
2. Program Keluarga Harapan (PKH) memerlukan mekanisme penyesuaian nilai bantuan yang responsif terhadap peningkatan kebutuhan hidup yang terus terjadi. Kenaikan biaya kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan yang membuat nilai bantuan yang tetap menjadi semakin tidak memadai. Jika besaran bantuan yang diberikan sesuai, maka akan mengurangi beban kebutuhan keluarga yang akan mengurangi ketergantungan rumah tangga terhadap pekerja anak.
3. Pemerintah perlu memastikan setiap anak penerima PKH mendapatkan akses penuh terhadap program pendidikan komplementer, seperti PIP. Kebijakan ini akan memastikan keberlanjutan pendidikan pada setiap anak hingga tingkat pendidikan tinggi.